



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/8057/B.07/HK/2024**

### TENTANG

#### **PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 1410/V.26/Sekret.1/X/2024, Hal : Permohonan Usulan Surat Keputusan Gubernur Lampung Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana, tanggal 18 Oktober 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/447/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal ~~20~~ - 11 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

**REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	1	1,447	1	0	A		
2	- <b>SEKRETARIS</b>	1	1,456	1	0	A	2,927	A
3	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	5,117	5	-2	A		
4	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,677	2	-2	A		
5	- <b>KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	1	1,477	1	0	A		
6	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	5,531	6	0	A		
7	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,941	3	-3	A		
8	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	3,492	3	-1	A		
9	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,334	2	-2	A		
10	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	0,941	1	-1	B		
11	- <b>KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET</b>	1	1,457	1	0	A		
12	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	5,649	6	-3	A		
13	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	2,320	2	-1	A		
14	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3,000	3	-3	A		
15	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,920	2	-2	A		
16	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,127	3	-3	A		
17	- <b>KEPALA BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI</b>	1	1,437	1	0	A	3,236	A
18	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	5,452	5	-2	A		
19	- PENGAWAS INDUSTRI	1	3,517	4	-3	A		
20	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
21	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2,131	2	-1	A		
22	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,671	3	-3	A		
23	- <b>KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI</b>	1	1,41	1	0	A	3,781	A
24	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	7,388	7	-2	A		
25	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3,277	3	-3	A		
26	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	2,125	2	-1	A		
27	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,334	2	-2	A		
28	- <b>KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI</b>	1	1,47	1	0	A	5,081	A
29	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	9	9,863	10	-1	A		
30	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2,407	2	-1	A		
31	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	2,972	3	-1	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
32	<b>KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	1	1,48	1	0	A	3,178	A
33	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	7,089	7	-2	A		
34	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	3,261	3	-2	A		
35	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,649	2	-2	A		
36	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,417	2	-2	A		
37	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,474	1	-1	A		
38	<b>KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	1	1,278	1	0	A	3,001	A
39	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	5,382	5	-5	A		
40	- FASILITATOR PERDAGANGAN	0	4,513	5	-5	A		
41	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3,261	3	-3	A		
42	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	2,025	2	-2	A		
43	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,358	1	-1	A		
44	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,468	1	-1	A		
45	<b>KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>	1	1,45	1	0	A	2,930	A
46	<b>KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA</b>	1	1,43	1	0	A		
47	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	4,529	5	-5	A		
48	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,653	3	-3	A		
49	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	7,295	7	-7	A		
50	<b>KEPALA SEKSI PENGAWASAN</b>	1	1,45	1	0	A		
51	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	3,515	4	-3	A		
52	- FASILITATOR PERDAGANGAN	0	3,221	3	-3	A		
53	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	-1	A		
54	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,514	3	-3	A		
55	<b>KEPALA SEKSI SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>	1	1,493	1	0	A		
56	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	3,515	4	-4	A		
57	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	2	3,261	3	-1	A		
58	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,736	2	-2	A		
59	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,581	3	-3	A		
60	<b>KEPALA UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN</b>	1	1,497	1	0	A	2,610	A
61	<b>KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA</b>	1	1,377	1	0	A		
62	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	3,515	4	-4	A		
63	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3,261	3	-3	A		
64	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,511	3	-3	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
65	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,745	2	-2	A		
66	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	4,532	5	-5	A		
67	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,552	2	-2	A		
68	- <b>KEPALA SEKSI DESAIN DAN KEMASAN INDUSTRI</b>	1	1,463	1	0	A		
69	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	3,515	4	-3	A		
70	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3,261	3	-3	A		
71	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,745	2	-2	A		
72	- <b>KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN JASA INDUSTRI</b>	1	1,463	1	0	A		
73	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	3,515	4	-4	A		
74	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3,261	3	-3	A		
75	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	2,436	2	-2	A		
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>214,526</b>	<b>208</b>	<b>-142</b>		<b>3,343</b>	<b>A</b>

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

**2.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

<b>KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG</b>	
<b>Dra. EVIE FATMAWATY M.Si</b>	Pembina Utama Muda NIP. 19690210 199001 2 001
<b>KEPALA BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN DAN PENGGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI</b>	<b>KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI</b>
Hayu dian Utomo, S.Sos., MM	Firwansyah, S.Sos., M.M.
<b>SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>
Ida Sari Yorita S.E.	1. C. Suryanata Rusdi, S.E. 2. Mashartoko, S.E. 3. Sonya Prisca, S.E., M.M. 4. Tri Joko Wirdigdo, S.E., M.M. 5. Elva Agustina, S.E.
<b>PENGAWAS INDUSTRI</b>	<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>
Heroyan, S.E.	1. Anisa Kartika Sari, S.E., M.M. 2. Fathurrohman SH 3. Resty Yunise Prima, S.Pd., M.M. 4. Neity Herawati Sihotang, S.Kom. 5. Widya Ginda Astuti, S.H. 6. Didi Supriadi, S.E.
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>	<b>FASILITATOR PERDAGANGAN</b>
M. Ridho Wira Prima, S.E.	Belum Ada pegawai
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>	<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>
Heroyan, S.E.	1. Jimson Purba, S.E. 2. Dian Pembayung Harvi P., S.T. 3. Neni Nur Yanti, S.E., M.M. 4. Ari Munita, S.T. 5. Subagyo, S.E. 6. Ir. Yon Farli 7. Tri Wahyu Astuti, S.E. 8. Cornelius Heri Prasetyo, S.E. 9. Defri S.E., M.M
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>	<b>KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI</b>
Firwansyah, S.Sos., M.M.	Dwi Prasetio, S.STP, M.Si
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>	<b>KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>
M. Zimmi Skill, S.E., M.M.	Endi Fauzi, S.T., M.T
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>	<b>KEPALA BIDANG LUAR NEGERI</b>

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Lukman Hakim	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
1. Ahmad Ghoffar 2. Rahman	1. Iswandi 2. Maulana Hasanudin	Chandra Agung	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Belum ada pegawai	Belum ada pegawai	Belum ada pegawai	Belum ada pegawai	1. Idham Kholid, S.H. 2. Rina Kurniati, S.Sos. 3. Elma Kaisi, S.E.	Budiyansyah A.Md
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	RIRI MEIRIZA S.STP., M.H.			PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
				Belum ada pegawai	Belum ada pegawai

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Iswandi 2. Maulana Hasanudin

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Belum ada pegawai

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Belum ada pegawai

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Belum Ada Pegawai

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Belum Ada Pegawai

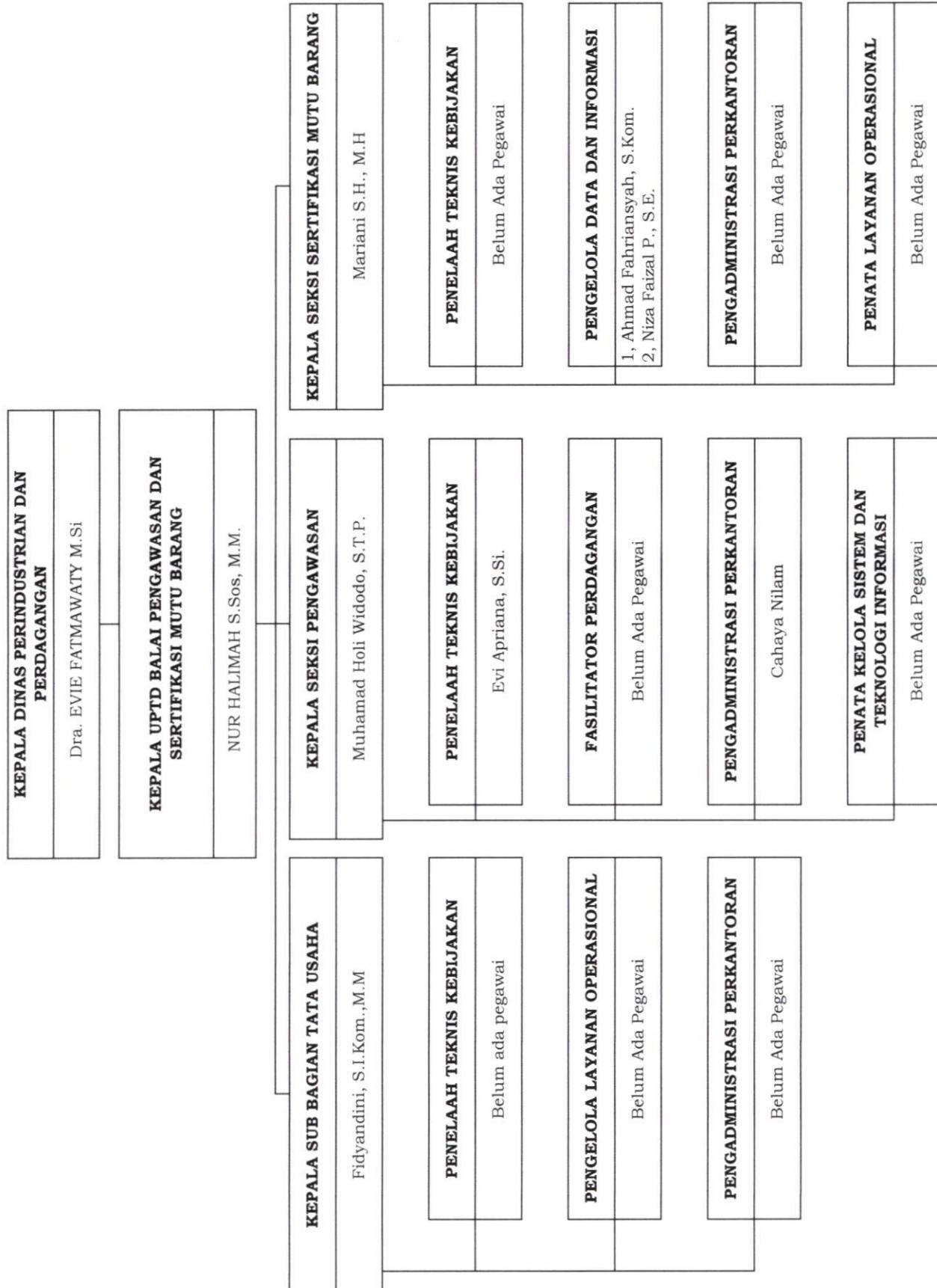
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Belum ada pegawai

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

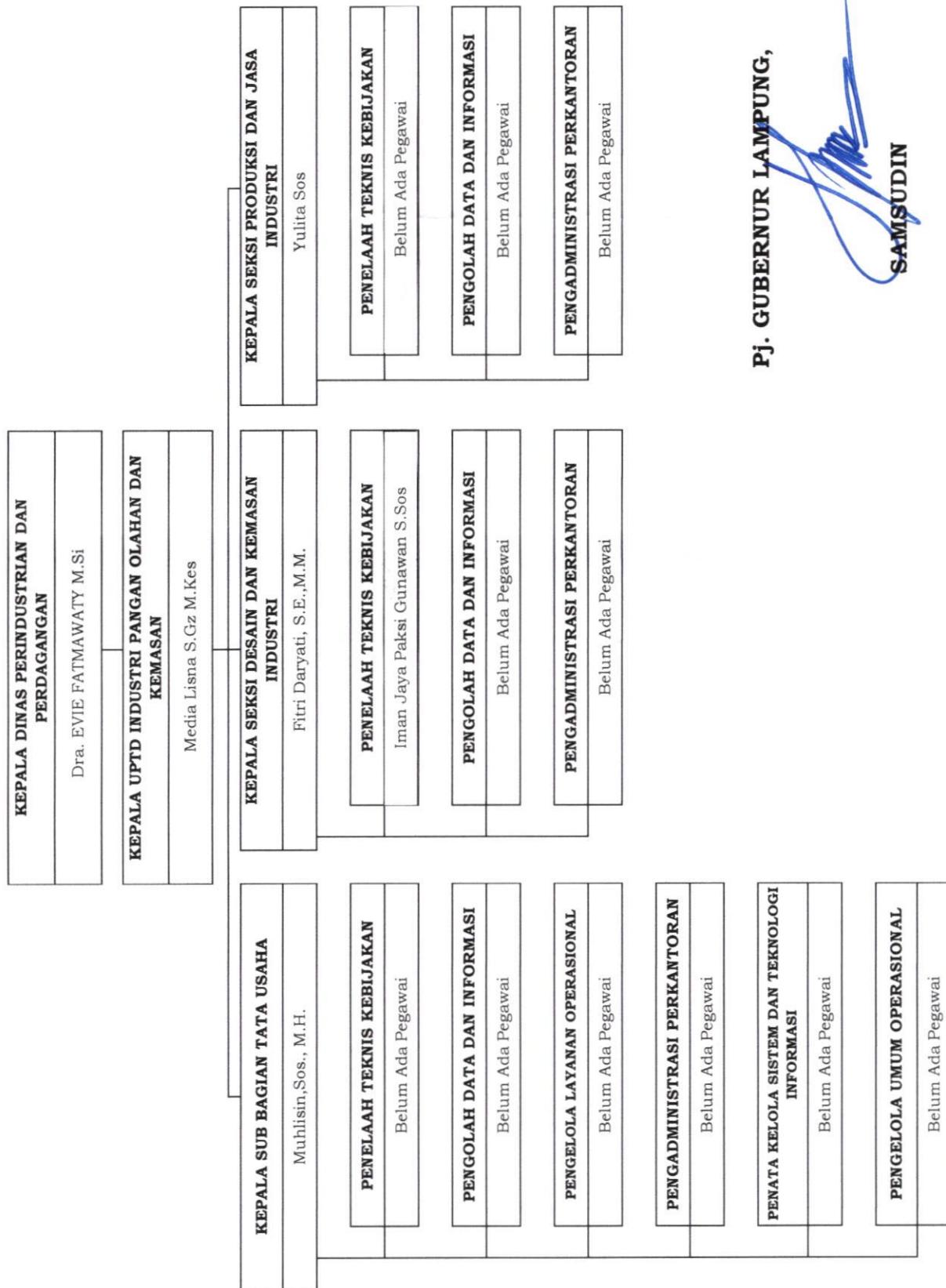
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

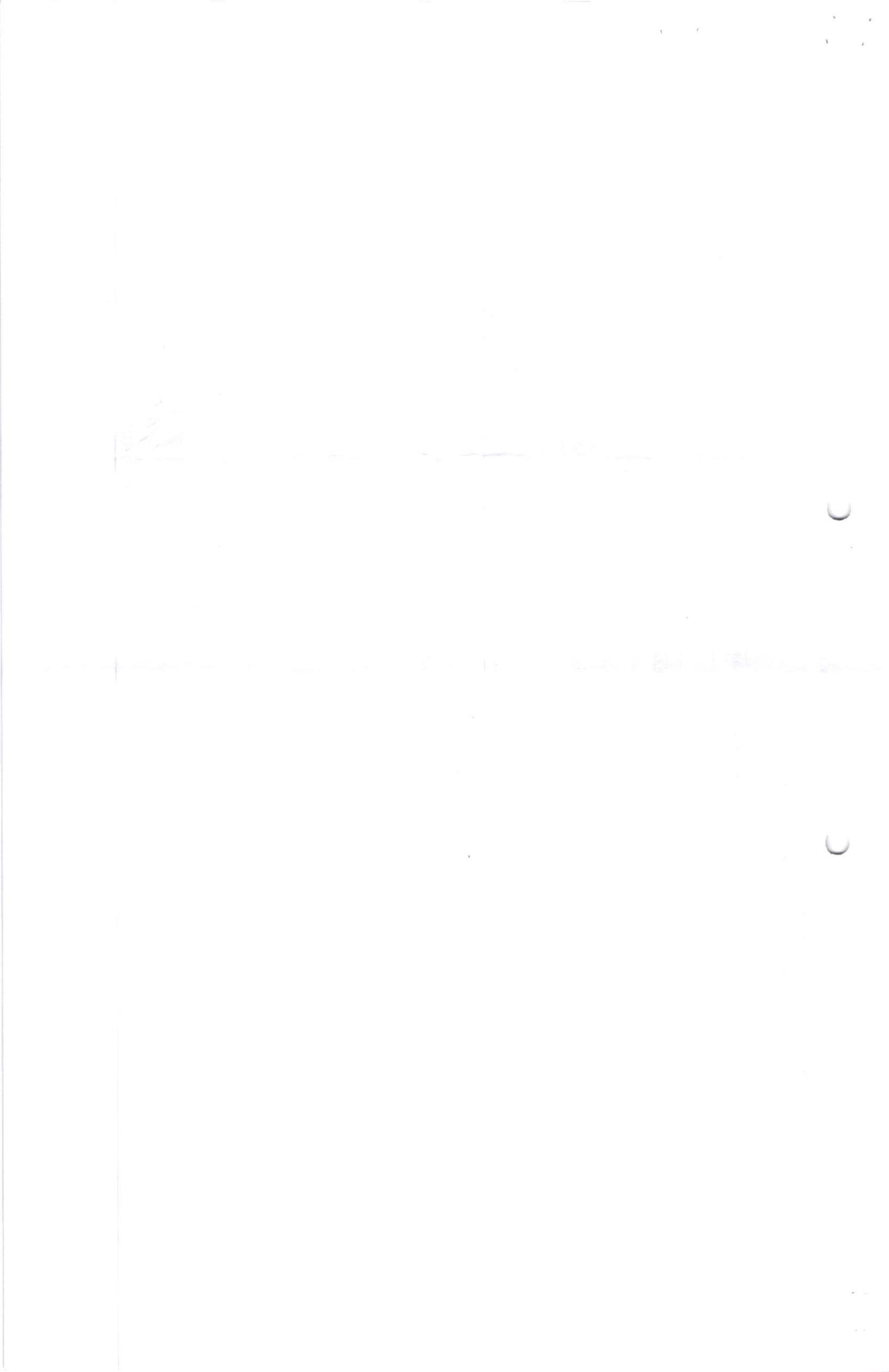
<b>PENGADMINTSTRASI PERKANTORAN</b>
Belum ada pegawai
<b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b>
Belum ada pegawai
<b>PENEELAAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>
1. Tri Vera Rianti, S.E. 2. Dharma Enif Wiguna, S.TP. 3. Nana Usyana, S.H.
<b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b>
Belum Ada Pegawai

**2.2 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN  
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG  
DINAS PEINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**



**2.3 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN  
UPTD INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

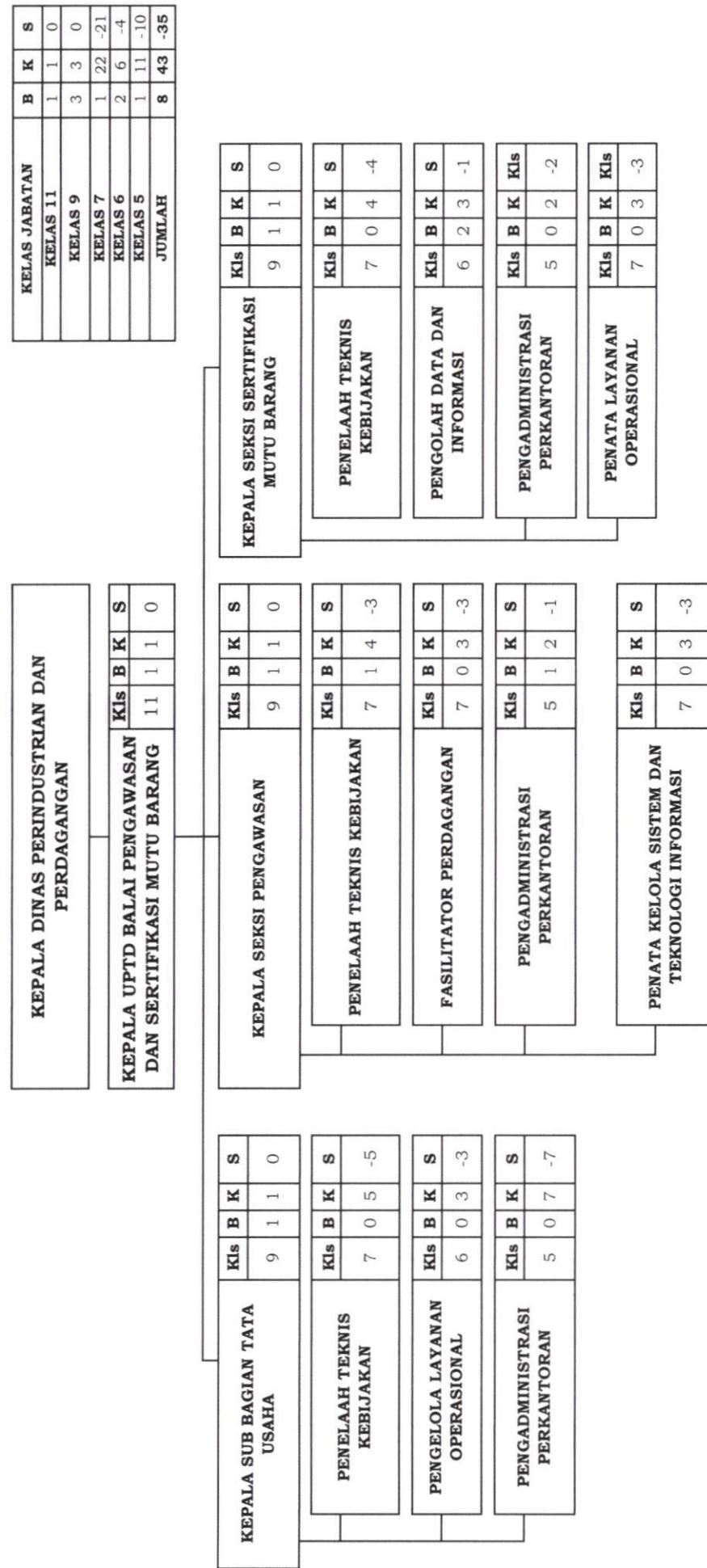




**3.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

<b>KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
	15	1	1	0	1	1	0	-
<b>KELAS JABATAN</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
KELAS 15					1	1	0	-
KELAS 12					1	1	0	-
KELAS 11					5	5	0	-
KELAS 9					2	2	0	-
KELAS 7					35	74	-39	-
KELAS 6					3	25	-22	-
KELAS 5					6	16	-10	-
<b>JUMLAH</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>124</b>	<b>.71</b>					
<b>KEPALA BIDANG KERJASAMA, PEMERINTAHAN DAN PEMERDAGGAN SUMBER DAYA INDUSTRI</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
KEPALA BIDANG PEMERDAGGAN INDUSTRI					11	1	0	-
<b>KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI					11	1	1	0
<b>KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI					11	1	1	0
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN					7	9	10	-1
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI					6	0	3	-3
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI					6	1	2	-1
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI					6	0	2	-2
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI					5	1	2	-1
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI					5	0	2	-1
<b>PENGADIMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGADIMINISTRASI PERKANTORAN					5	2	3	-1
<b>PENGADIMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGADIMINISTRASI PERKANTORAN					5	1	2	-1
<b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENATA LAYANAN OPERASIONAL					7	0	2	-2
<b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENATA LAYANAN OPERASIONAL					7	0	2	-1
<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET					9	1	1	0
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN					7	3	6	-3
<b>PENGOLAH LAYANAN OPERASIONAL</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGOLAH LAYANAN OPERASIONAL					6	1	2	-1
<b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI					6	0	3	-3
<b>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN					5	0	2	-2
<b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENATA LAYANAN OPERASIONAL					7	0	1	-1
<b>PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL					6	0	1	-1
<b>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN					7	3	5	-2
<b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>Kls</b>	<b>B</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
PENATA LAYANAN OPERASIONAL					7	0	2	-2

**3.2 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**



### **3.3 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBEAN KERJA**

**UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG**

Pi. GUBERNUR LAMPUNG.